

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Neng Desi Rahmawati

NIM : 222611101

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul: **PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 26 September 2024

Saya yang menyatakan,

A red postage stamp with a Garuda emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'TEL. 20', 'METERAI TEMPEL', and '350ALX318936667'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Neng Desi Rahmawati
NIM: 222611101

PENGESAHAN

Judul Tesis	:	PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF)
Nama	:	NENG DESI RAHMAWATI
NIM	:	222611101
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H).

Serang, Agustus 2024

Direktur,



Prof. Dr. H. Ilzamudin Ma'mur, M.A
NIP. 196108291990031002

PERSETUJUAN TIM PENGUJIAN UJIAN TESIS

Judul : **PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN
MUT'AH DALAM PERCERAIAN DI
INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI
KOMPARATIF)**

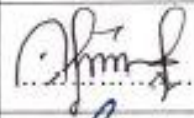



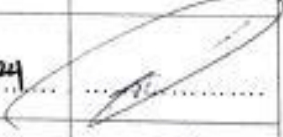

Nama : Neng Desi Rahmawati

NIM : 222611101

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Diujikan dan dinyatakan lulus pada tanggal : 31 Oktober 2024

TIM PENGUJI

No	Jabatan	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1	Ketua Penguji	Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si	28/10/2024	
2	Sekretaris	Dr. Dini Fitriani, M.Pd	28/10/2024	
3	Penguji I	Dr. Ahmad Hidayat, Lc. M.Ag	28/10/2024	
4	Penguji II	Dr. Usman, M.Ag	28/10/2024	
5	Pembimbing I	Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum	19/10/2024	
6	Pembimbing II	Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A	31/10/2024	

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Di Serang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang berjudul: **PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF)** yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : Neng Desi Rahmawati
NIM : 222611101
Program Studi : Magister (S2)
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN SMH BANTEN untuk diajukan dalam mengikuti sidang Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

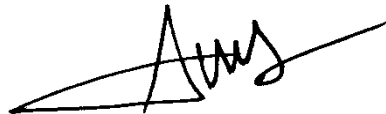
Serang, 21 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Oom Mukarromah, M. Hum
NIP. 19650227 199003 2 003



Dr. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19780225 200801 1 009

ABSTRAK

Neng Desi Rahmawati, NIM. 222611101. PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (STUDI KOMPARATIF)

Mekanisme dalam menjamin pemenuhan hak-hak nafkah kepada istri setelah perceraian di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan. Pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian di Indonesia masih dipandang sebagai urusan pribadi dalam menyelesaikan perkara perceraian, sementara di Malaysia persoalan pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian menjadi urusan negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemberian nafkah *iddah* dan *Mut'ah* dalam perceraian di Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017? 2) Bagaimana pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perceraian di Malaysia berdasarkan UU Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003? 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Indonesia dan Malaysia?

Penelitian ini menerapkan metode *yuridis normatif* dengan berfokus pada analisis undang-undang yang berlaku, pertimbangan putusan hakim pengadilan, pendapat para ahli hukum terkemuka dan teori-teori hukum. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengkaji Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 dan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003 dan relevansinya dalam putusan hakim untuk menyelesaikan perceraian dan putusan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama di Indonesia dan di Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tidak adanya sosialisasi dari pihak pengadilan terkait Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 ini kepada masyarakat, tidak mengikatnya sanksi yang diberikan kepada suami apabila tidak melunasi hak-hak yang diminta oleh istri dan kebanyakan dari cerai gugat diputuskan secara *verstek*; 2) Perundang-undangan di Malaysia sangat memfokuskan terhadap masalah pengabaian nafkah isteri pasca perceraian oleh mantan suami. Ketentuan hukum yang mengatur tentang hak terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003; 3) Persamaan antara Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama mewajibkan *nafkah iddah* dan *mut'ah* akibat dari putusnya perkawinan. Perbedaannya di Indonesia tidak ada hukuman yang diberikan jika tidak memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah*, sedangkan di Malaysia akan di denda kurang lebih 1000 ringgit atau penjara kurang lebih 6 bulan, pemberian *nafkah iddah* dan *mut'ah* di Indonesia berakhir jika yang menerima tunjangan itu sudah menikah lagi, di Malaysia bisa berakhir ketika meninggal dunia, menikah kembali, dan telah tinggal bersama orang lain.

Kata Kunci: *Pemberian Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017, Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen No 17 Tahun 2003.*

ABSTRACT

Neng Desi Rahmawati, NIM. 222611101. PROVISION OF IDDAH AND MUT'AH SUPPORT IN DIVORCE CASES IN INDONESIA AND MALAYSIA (COMPARATIVE STUDY)

The mechanism for ensuring the fulfillment of a wife's maintenance rights after divorce in Indonesia and Malaysia is different. Fulfilling a wife's maintenance rights after a divorce in Indonesia is still seen as a private matter in resolving divorce cases, while in Malaysia the issue of fulfilling a wife's maintenance rights after a divorce is a state matter.

The formulation of the problem in this research is: 1) How is iddah and mut'ah support provided in divorce cases in Indonesia based on Supreme Court Regulations Number 3 of 2017? 2) How is iddah and mut'ah maintenance provided in divorce cases in Malaysia based on the Islamic Family Enakment Law Number 17 of 2003? 3) What are the similarities and differences between providing iddah and mut'ah maintenance in Indonesia and Malaysia?

This research applies normative juridical methods by focusing on analysis of applicable laws, considerations of court judges' decisions, opinions of leading legal experts and legal theories. This research includes library research, which aims to examine Supreme Court Regulations No. 3 of 2017 and the Islamic Family Entitlement Law No. 17 of 2003 and their relevance in the judge's decision to resolve divorce cases and the determination regarding the provision of iddah and mut'ah maintenance after divorce in Religious Courts in Indonesia and Malaysia.

The results of the study show that: 1) In Supreme Court Regulations No. 3 of 2017 there was no socialization from the court regarding Circular of the Supreme Court No. 2 of 2019 to the public, the sanctions given to husbands if they do not pay off the rights requested by the wife are not binding and most of the divorce cases are decided by default. Legislation in Malaysia focuses heavily on the issue of neglect of the wife's maintenance after divorce by the ex-husband. Legal provisions governing the right to maintenance of iddah and mut'ah have been regulated in the Enakmen Islamic Family Law Number 17 of 2003; 2) The provision of iddah and mut'ah maintenance in Indonesia and Malaysia as a result of the dissolution of marriage due to divorce and based on the judge's decision, in Indonesia there is no punishment given to the ex-husband if he does not provide iddah and mut'ah maintenance, while in Malaysia he will be fined approximately 1000 ringgit or imprisoned for approximately 6 months, the provision of iddah and mut'ah maintenance in Indonesia will end if the recipient of the support has remarried, in Malaysia it can end when the recipient dies, remarries, and has lived with someone else.

Keywords: *Providing Iddah Support, Mut'ah Support, Supreme Court Regulations No. 3 of 2017, Islamic Family Enakmen Law No. 17 of 2003.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim,

Dengan Rahmat Allah SWT. *Alhamdulillah wa'syukurillah*, penulis panjatkan ke hadirat Allah 'Azza Wajalla, yang telah memberikan taburan nikmat, kasih sayang, serta yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga terselesainya Tesis yang berjudul "Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perceraian di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif).

Shalawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam dan Uswatun Hadanah Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan sumber ilmu dan hukum yang telah diridhoi-Nya.

Penulis berupaya penuh semangat dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari banyak melibatkan berbagai pihak yang telah mendukung baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan penghargaan/apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan *jazakumullahu khairan Khatsiron* yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah menjadikan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilzamudin Ma'mur, M.A., Direktur Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam proses pelaksanaan penelitian.

3. Bapak Dr. Nurul Ma;rifah, M.Si., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penelitian.
4. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M. Hum., Pembimbing I, dan Bapak Dr. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing II, yang selalu sabar dan tak bosan-bosan memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penyusun Tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran selama proses perkuliahan.
6. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan motivasi dan doa selama penulis menjalani proses jenjang pendidikan.
7. Teman-teman Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam Reg. 1 yang telah memberikan semangat dalam penyusunan tesis ini.

Serang, 26 September 2024

Saya yang menyatakan,

Neng Desi Rahmawati

NIM: 222611101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Batasan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>).....	24
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II TEORI RELEVAN DAN KERANGKA KONSEP	29
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	29
1. Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia	32
2. Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Malaysia	41
B. Batas Usia Dalam Perkawinan di Indonesia dan Malaysia	46
1. Batas Usia Dalam Perkawinan di Indonesia.....	48
2. Batas Usia Dalam Perkawinan di Malaysia.....	53

C.	Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat: di Indonesia dan Malaysia.....	55
1.	Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia.....	55
2.	Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Malaysia.....	59
D.	Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	63
1.	Peraturan Perceraian di Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan.....	71
2.	Peraturan Perceraian di Malaysia dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.....	82
E.	Tinjauan Umum Tentang Nafkah Iddah.....	93
1.	Pemberian Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai di Indonesia.....	96
2.	Pemberian Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai di Malaysia.....	99
F.	Tinjauan Umum Tentang Nafkah Mut'ah.....	111
1.	Pemberian Nafkah Mut'ah di Indonesia.....	115
2.	Pemberian Nafkah Mut'ah di Malaysia.....	116
G.	Kerangka Konseptual.....	119
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		123
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	123
B.	Data dan Sumber Data.....	124
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	126
D.	Teknik Analisis Data.....	126
E.	Teknik Keabsahan Data.....	127

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	129
A. Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perceraian di Indonesia Berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017	129
B. Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai di Malaysia Berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam Enakmen Nomor 17 Tahun 2003.....	159
C. Persamaan dan Perbedaan Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah di Indonesia dan Malaysia.....	170
BAB V PENUTUP	186
A. Kesimpulan	186
B. Saran.....	189
DAFTAR PUSTAKA	191
BIOGRAFI PENULIS.....	203